

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja Perangkat Daerah juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal Perangkat Daerah. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- 1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal Perangkat Daerah;

- 2) Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perangkat Daerah, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- 4) Rumusan program/kegiatan di dalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- 5) Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UNdang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026.
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan menjadi komitmen bersama bagi pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar tugas pokok dan fungsi SKPD.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja anggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DISKOMINFOSP TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA DISKOMINFOSP

Evaluasi kinerja merupakan penilaian keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kegiatan evaluasi pencapaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja kegiatan, dan membandingkannya dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian kinerja renstra didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan renstra dan digunakan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Analisis pencapaian kinerja dilaksanakan melalui telaahan/kajian yang mendasar tentang berbagai faktor kunci keberhasilan atau kegagalan. Hal ini penting dalam menyikapi kinerja organisasi ke depan, sehingga keberhasilan yang diraih dapat ditingkatkan dan kegagalan yang terjadi mendapat solusi yang tepat.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah melaksanakan kegiatan sesuai tugas, pokok dan fungsinya menyelesaikan beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu :

- 1) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ;
- 2) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022;
- 3) Menyusun Rencana Kerja SKPD ;
- 4) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2022;

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditunjang dengan Belanja Operasi Sebesar Rp. 5.822.111.878 (Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.349.667.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja.

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun 2022 sebanyak 5 program, dijabarkan dalam 13 kegiatan dan 56 sub kegiatan dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut :

Realisasi sebesar Rp.8.152.424.485 (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.800.000 (delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.800.000 atau 100 %.
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 2.975.000 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.975.000 atau 100 %
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.725.000 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.675.000 atau 98,9 %
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.975.000 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.725.000 atau 100 %
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.225.000 (empat juta Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.225.000 atau 100 %

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.875.000 (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.875.000 atau 100 %
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.529.319.000 (Dua Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 2.460.792.150 atau 97,29 %.
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.395.000 (Delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.395.000 atau 100 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.500.000 atau 100 %.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.100.000 (Empat juta seratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.100.000 atau 100 %.
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.000.000 atau 100 %.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran alokasi sebesar Rp. 1.932.755.000 (Satu milyar Sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.926.301.157 atau 99,66 %.

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran alokasi sebesar Rp. 250.708.000 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 246.663.800 atau 98,39 %.
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.040.000 (enam puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 68.040.000 atau 100%.
 - Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran Rp. 11.190.000 (sebelas Juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.495.000 atau 58,04.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 197.814.609 atau 98,91 %.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.308.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.23.308.000 atau 100 %.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.224.800 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 21.417.800 atau 96,37 %.
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.999.761 (empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 49.332.731 atau 98,65 %.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 143.010.600 (seratus empat puluh tiga juta sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 134.707.400 atau 94,19 %.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.615.000 (empat puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 41.278.360 atau 99,2 %.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.939.000 (seratus enam belas juta Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 113.962.352 atau 97,45 %.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran Rp. 39.396.717 (tiga puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 39.396.000 atau 99,99 %.
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.843.000 (enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 50.535.600 atau 81,72 %.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.587.000 (tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 7.573.000 atau 99,99 %.

- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.200.000 (dua puluh empat juta dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Ro.24.176.800 atau 99,9 %.
- Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan alokasi anggaran Rp.867.500.000 (delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 867.460.000 atau 99,99 %.
- Pelayanan Informasi Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.004.000 (dua ratus Sembilan puluh tiga juta empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 292.988.600 atau 99,99 %.
- Layanan Hubungan Media dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 45.000.000 atau 100 %.
- Kemitraan dengan Pemangku kepentingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.971.800 atau 99,89 %.

2. Program Aplikasi Informatika

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.329.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 27.329.000 atau 100 %.
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dan teralisasi sebesar Rp. 13.900.000 atau 86,88 %.

- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.449.000 (tiga belas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 11.643.000 atau 86,57 %.
- b. Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 175.297.000 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 174.220.400 atau 99,39 %.
 - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.504.000 (delapan belas juta lima ratus empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 18.202.800 atau 98,37 %.
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 730.000 atau 100 %.
 - Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 155.071.000 (seratus lima puluh lima juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 154.107.954 atau 99,38 %.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.625.000 (empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 40.448.600 atau 92,81 %.
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.737.000 (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 54.537.000 atau 92,85 %.

- Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 765.000 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 765.000 atau 100 %.
- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Saing Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.677.400 (enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 68.219.999 atau 99,33 %.
- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.547.000 (tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 39.510.880 atau 99,91 %.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.124.000 (tiga puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 30.083.000 atau 99,86 %.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.586.000 (enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 67.779.494 atau 98,82 %.
- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.443.000 (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 23.885.000 atau 97,72 %.

- Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.264.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.588.600 atau 70,91 %.
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.233.000 (delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 8.037.000 atau 99,4 %.
- Pengembangan Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.702.000 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 57.356.400 atau 99,41 %.
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.615.000 (tujuh belas juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 17.057.000 atau 96,83 %.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.892.600 (empat belas juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 14.892.400 atau 99,99%.
 - Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 237.406.700 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 237.406.700 atau 100 %.

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.209.000 (tiga puluh enam juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 36.209.000 atau 100 %.
 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 227.907.300 (dua ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 227.784.199 atau 99,95 %.
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.005.000 (seratus delapan juta lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 107.965.900 atau 99,96 %.

TABEL T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)	
216				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	72,31%	98,02	63,03	98	1,55	70,28	266,28	3,77	
216	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	100%	96,65	100	98,01	0,98	100	294,66	2,9
216	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	96,65	100	99,85	0,99	100	296,5	2,9
216	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	0,6	3 Dokumen	11	2,2
216	01	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
216	01	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
216	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
216	01	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
216	01	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0	1 Laporan	0	0

216	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	2	2 Laporan	9	45
216	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	100 %	100 %	100 %	97,31 %	0,97	100 %	297,31	2,9
216	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	35 Orang	35 Orang	30 Orang	0,85	35 Orang	100	2,8
216	01	2.02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1	1
216	01	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1251 Dokumen	1,251	1000 Dokumen	3251	3,21
216	01	2.02	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1	1
216	01	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5	1 Laporan	3	3
216	01	2.02	006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1	1
216	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan	1	12 Laporan	24	2
216	01	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	0	12 Laporan	36	3
216	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja	100 %	0	100 %	0	0	100 %	100	1
216	01	2.03	001	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0	1 Laporan	1	1
216	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja	100 %	99,7	100 %	0	0	100 %	199,7	1,9
216	01	2.05	001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35 Orang	0	35 Orang	0	0	35 Orang	35	1
216	01	2.05	002	Perindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindah-tugaskan	1 Orang	0	1 Orang	0	0	1 Orang	1	1
216	01	2.05	003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	1	2 Orang	6	3
216	01	2.05	004	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	0	50 Orang	0	0	50 Orang	50	1

216	01	2.05	005	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang	0	2 Orang	0	0	2 Orang	2	1
216	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja	100 %	99,2	100 %	96,87 %	0,9687	100 %	293,07	2,9
216	01	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	0	1 Paket	1	1
216	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	0	1 Paket	2	2
216	01	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	0	0	1 Paket	1	1
216	01	2.06	004	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	1	1 Paket	3	3
216	01	2.06	005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	25 Dokumen	23 Dokumen	25 Dokumen	73 Dokumen	2,92	25 Dokumen	121	4,84
216	01	2.06	006	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 laporan	1 Laporan	1 laporan	2 laporan	2	1 laporan	4	4
216	01	2.06	007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	200 Laporan	120 laporan	250 laporan	2,083	120 laporan	570	4,75
216	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	1 paket	1 Paket	1 Paket	1	1 Paket	3	3
216	01	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	0	0	1 Unit	1	1
216	01	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	0	0	1 Unit	1	1
216	01	2.07	003	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	1 Paket	3	3
216	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja	100 %	96,4	100 %	95,45 %	0,954	100 %	291,85	2,9
216	01	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	3	3
216	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12	1 Laporan	14	14
216	01	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	1 Laporan	2	2
216	01	2.08	003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	3	3

216	01	2.09	001	Pereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	99,9 %	100 %	94,37 %	0,943	100 %	294,27	2,9
216	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Uhit	1 Uhit	1 Uhit	1 Uhit	1	1 Uhit	3	3
216	01	2.09	003	Penyediaan Jasa Perawatan, Biaya Perawatan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Uhit	10 Uhit	10 Uhit	10 Uhit	1	10 Uhit	30	3
216	01	2.09	004	Pereliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 Uhit	0	1 Uhit	0	0	1 Uhit	1	1
216	01	2.09	005	Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Uhit	0	5 Uhit	0	0	5 Uhit	5	1
216	01	2.09	006	Perawatan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Uhit	0	1 Uhit	1 Uhit	1	1 Uhit	2	2
216	01	2.09	007	Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	15 unit	0	15 unit	1 unit	0,067	15 unit	16	1,1
216	01	2.09	008	Perawatan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	15 unit	0	15 unit	0	0	15 unit	15	1
216	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas	100 %	99,4 %	100 %	100 %	1	100 %	299,4	2,9
216	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola	100 %	99,4	100 %	100 %	1	100 %	299,4	2,9
216	02	2.01	001	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3
216	02	2.01	002	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	2	2
216	02	2.01	003	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3
216	02	2.01	004	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3
216	02	2.01	005	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3

216	02	2.01	006	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	7 Layanan Media	7 Layanan Media	7 Layanan Media	5 Layanan Media	0,714	7 Layanan Media	19	2,7
216	02	2.01	007	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3
216	02	2.01	008	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1	1
216	02	2.01	009	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang	0	3 Orang	0	0	3 Orang	3	1
216	02	2.01	010	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1	1
216	02	2.01	011	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1	1
216	02	2.01	012	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	10 Unit	0	10 Unit	0	0	10 Unit	10	1
216	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi	100 %	86,2 %	100 %	100 %	1	100 %	282,2 %	2,82
216	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah	100 %	86,9 %	100 %	100 %	1	100 %	286,9 %	2,86
216	03	2.01	001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	1 Domain	1 Domain	1 Domain	1	1 Domain	3	3
216	03	2.01	002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3
216	03	2.01	003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1 Unit	3	3
216	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola	100 %	86 %	100 %	98 %	0,98	100 %	284 %	2,84
216	03	2.02	001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3

216	03	2.02	002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3
216	03	2.02	003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Uhit	1 Uhit	1 Uhit	1 Uhit	1	1 Uhit	3	3
216	03	2.02	004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3
216	03	2.02	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1	1
216	03	2.02	006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	34 Perangkat Daerah	0	34 Perangkat Daerah	0	0	34 Perangkat Daerah	34	1
216	03	2.02	007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	1 Uhit	1 Uhit	1 Uhit	1 Uhit	1	1 Uhit	3	3
216	03	2.02	008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	0	1 Layanan	0	0	1 Layanan	0	0
216	03	2.02	009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0
216	03	2.02	010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	0
216	03	2.02	011	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3
216	03	2.02	012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPEE	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPEE	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3
2.20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2.20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	100 %	99,9 %	100 %	94 %	0,94	100 %	293,9	2,93
2.20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	99,9 %	100 %	94 %	0,94	100 %	293,9	2,93

2.20	02	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3	3
2.20	02	2.01	002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemerintah yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	64 Orang	0	64 Orang	21 Orang	0,33	64 Orang	85	1,32
2.20	02	2.01	003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	2	2
2.20	02	2.01	004	Peningkatan Kapasitas Kelengkapan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	14 Perangkat Daerah	0	14 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	1,5	14 Perangkat Daerah	35	2,5
2.20	02	2.01	005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	0	1 Unit	0	0	1 Unit	1	1
2.20	02	2.01	006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	2	2
2.21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2.21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	99,9%	100 %	99,97 %	0,9997	100 %	299,8 %	2,99
2.21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	100 %	99,9%	100 %	99,97 %	0,9997	100 %	299,8 %	2,99
2.21	02	2.01	001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	2	2
2.21	02	2.01	002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	2	2
2.21	02	2.01	003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	2	2
2.21	02	2.01	004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1	1 Perangkat Daerah	3	3

2.21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	100 %	100 %	100 %	99,96 %	0,9996	100 %	299,96 %	2,99
2.21	02	2.02	001	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	0	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1	1 Perangkat Daerah	2	2

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis standar kebutuhan pelayanan sendiri dirumuskan indikator untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tahun 2022 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan, namun menurut ketentuan bahwa data pencapaian kinerja pelayanan Perangkat daerah tiga tahun dari tahun perencanaan sehingga data n-2.

TABEL TC-30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Sttaistik dan Persandian Tahun 2022
Kabupaten Kepulauan Selayar

Nb	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	-	Nlai SAKIP	CC	CC	B	BB	C	-	-	-	CC	B	
			Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	-	-	Sesuai	Sesuai	
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DiskominfoSP	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%	75,13 %	-	-	-	72,50%	75,00%	
2.	Digitalisasi Penyelenggaraan Urusan Peemrintahan yang Didesentralisasikan ke Kabupaten	-	Persentase perangkat daerah yang mampu menerapkan digitalisasi pelayanan publik	30 %	50 %	70 %	90 %	100 %	-	-	-	75 %	100 %	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,3	2,6	2,8	3,0	3,5	-	-	-	2,6	2,8	
			Persentase PPID yang aktif	50%	75%	100%	100%	37,83%	-	-	-	30%	50%	
			Persentase KIM yang aktif	51,1 %	68,2 %	8%,3 %	100 %	100 %	-	-	-	68,2 %	8%,3 %	
4.	Meningkatnya Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika Daerah	-	Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	70%	80%	90%	100%	138,5%	-	-	-	100%	100%	
5.	Meningkatnya Pengelolaan Data Statistik Sektoral	-	Jumlah data sektoral yang disertai metadata dan didesiminasi	250	280	300	300	235	-	-	-	450	450	
			Jumlah SDM Penda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistic sektoral	65	65	65	65	21	-	-	-	91	91	
			Jumlah Infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai data	0	1	1	1	0	-	-	-	1	1	

5.	Meningkatnya Layanan Persandian		Indeks keamanan pemerintah daerah	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	Tingkat II	-	-	-	Tingkat I	Tingkat II	
6.	Meningkatnya Layanan Telekomunikasi di Desa	-	Persentase desa yang terjangkau sarana telekomunikasi	80%	82%	84%	86%	96,96%	-	-	-	82%	84%	
			Persentase desa yang menggunakan Website Desa	40%	60%	80%	100%	9,87%	-	-	-	60%	80%	

- Untuk indikator Nilai Sakip OPD dan Laporan Keuangan OPD sesuai SAP belum dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Untuk Indikator Laporan Keuangan OPD sesuai SAP belum dilakukan pengukuran oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kominfo SP menunjukkan realisasi 75,13% untuk 3 (tiga) layanan yaitu Ketersediaan Telepon / Internet, Informasi Publik dan Transparansi Publik. Untuk pelayanan ketersediaan Telepon / Internet, Pelayanan Informasi Publik dan Transparansi Publik telah mencapai target karena beberapa daerah telah terjangkau jaringan telekomunikasi.
- Perangkat daerah yang mampu menerapkan proses digitalisasi pelayanan publik Tahun 2022 ditargetkan 30 % atau 11 OPD dan terealisasi 100 % atau 37 (Tiga Puluh Tujuh) OPD. Tercapainya target disebabkan karena pada Bulan Desember Tahun 2022, Semua OPD telah menggunakan Layanan TTE (Tanda Tangan Elektronik) dengan tujuan untuk mengefisienkan proses administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Selayar. Di samping pada beberapa OPD terdapat Layanan Publik lainnya antara lain: Sekretariat Daerah (LPSE), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Layanan Perizinan : SimpelNaker, OSS, Si Cantik), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Layanan Kependudukan), Dinas Kesehatan (Layanan Rujukan) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian (SP4N LAPOR).
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menunjukkan hasil 1,83 dengan predikat cukup. Menunjukkan target yang ingin dicapai pada tahun 2022 mencapai 91,15%, hal ini didapat dicapai karena beberapa OPD telah menerapkan layanan berbasis elektronik baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik. Pemerintah Daerah telah Menyusun konsep layanan terintegrasi yaitu Peraturan Bupati tentang Arsitektur SPBE dan telah melalui proses fasilitasi di Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 18 Perangkat Daerah yang telah membangun sistem dalam bentuk aplikasi secara mandiri untuk mempermudah layanan.

- Untuk indikator PPID yang aktif ditargetkan 34,1 % (10 PPID) dan terealisasi 10,81 % (4) PPID yaitu PPID Pembantu pada Dinas Kominfo SP, PPID Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan PPID Pembantu Dinas Perumahan dan Permukiman. Tidak tercapainya target disebabkan karena pelaksanaan PPID di semua Perangkat Daerah belum dilaksanakan secara maksimal.
- Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif ditargetkan 34,1 % (13 KIM) dan terealisasi 100% (13 KIM). Capaian target disebabkan karena jangkauan jaringan telah merata di beberapa tempat sehingga akses informasi telah dapat dilakukan dengan cepat.
- Persentase wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi ditargetkan 57 %, dan terealisasi 79 % atau capaian 138,5 %, target tercapai disebabkan karena DiskominfoSP telah melakukan identifikasi ketersediaan signal di semua desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk mengetahui kondisi jaringan yang ada di setiap desa. Terdapat 71 Desa dan Kelurahan yang terjangkau jaringan dari 88 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini di dukung dengan Pembangunan Menara telekomunikasi Program 3435 Non 3T Kemkominfo RI di beberapa wilayah yaitu Site Putabangun Kecamatan Bontoharu (Tower Sudah berfungsi), Site Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai (Tower Sudah berfungsi), Site Bontomarannu Kecamatan Bontomanai (Tower Sudah berfungsi), Site Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu (Sementara Proses Pembangunan), Site Lantibongan Kecamatan Bontosikuyu (Sementara Proses Pembangunan), Site Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur (Tower Sudah berfungsi), Site Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu Timur (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), site Labuang pamajang Kecamatan Pasimasunggu (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), Site Maminasa Kecamatan Pasimasunggu (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), Site Bonea Kecamatan Pasimarannu (sementara penggalian), Site lambego Kecamatan Pasimarannu (Tower Sudah berfungsi), Site Komba-Komba (towernya sudah terbangun tinggal pemasangan perangkat), Site Pulo Madu, Site garaupa Raya, Site Karumpa dan Site Kalaotoa (tower sudah terbangun, tinggal

menunggu pemasangan perangkat), Site Jinato Kecamatan Takabonerate (Towernya sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat), Site Tarupa Kecamatan Takabonerate (Tower Sudah berfungsi) dan Site Khusus Pasitallu (Tower sudah terbangun, tinggal pemasangan perangkat).

- Jumlah Data Sektoral (data dari semua OPD) yang disertai Metadata dan diseminasi, ditargetkan 250 data dan terealisasi 235 data atau 94 %. Target belum tercapai 100% disebabkan karena beberapa perangkat daerah belum memiliki metadata, dimana untuk menyusun metadata dilakukan pengumpulan, analisis dan pengolahan data sektoral yang ada di OPD, instansi vertikal, BUMN dan BUMD yang ada diselayar, dan masih terbatasnya sumber daya pengelola data di tiap perangkat daerah.
- Jumlah SDM Pemda yang memiliki kualifikasi teknis terkait penyelenggaraan statistik sektoral, ditargetkan 65 orang dan terealisasi 22 orang atau capaian (33,84 %). Tidak tercapainya target disebabkan karena masih terbatasnya sumber daya manusia (PNS dan PTT Perangkat Daerah) yang telah mengikuti Bimtek/Diklat teknis terkait metadata dan penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan oleh BPS, DiskominfoSP Kabupaten Kepulauan Selayar dan Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan, di samping itu rendahnya capaian target disebabkan karena masih kurangnya motivasi dan dukungan dari perangkat daerah masing-masing dari segi anggaran.
- Jumlah infrastruktur data sarana akses dan bagi pakai ditargetkan 1 aplikasi dan tidak terealisasi karena anggaran sub kegiatan pengadaan infrastruktur data tahun anggaran 2022 tidak mencukupi, untuk itu dalam tahun 2022 pelaksanaan kegiatan masih sebatas koordinasi dengan pihak terkait untuk pembuatan aplikasi/aplikasi/website data statistik sektoral daerah.
- Untuk Indeks Keamanan Informasi Pemerintah Daerah, dari target Tingkat I terealisasi Tingkat II atau Capaian 100 %. Indeks Keamanan Informasi menilai 5 area pengamanan yaitu tata kelola keamanan informasi, pengelolaan resiko keamanan informasi, kerangka kerja keamanan informasi, pengelolaan asset informasi dan teknologi dan keamanan informasi. Target dapat tercapai karena telah dilakukannya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di 13 Perangkat Daerah yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas

Kepemududukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Inspektorat Daerah, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD pada tahap identifikasi kerawanan dan resiko sistem elektronik.

- Untuk indikator Persentase Desa yang terjangkau telekomunikasi, ditargetkan 82 % (66 desa) dan terealisasi (64 desa) atau capaian 96,96 %, belum tercapainya target disebabkan karena Menara telekomunikasi di beberapa wilayah belum berfungsi dengan baik, untuk itu akan dilakukan Kerjasama dan fasilitasi provider atau perusahaan operator seluler untuk membangun tower di desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi
- Desa yang ditargetkan menggunakan Website Desa 40 % (32 desa) dan terealisasi 9,87 % (8 desa) atau capaian 25 %. Tidak tercapainya target disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan SDM Aparatur Desa dalam hal Teknologi Informasi.

REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2022 sebesar Rp. 8.152.424.485,- atau terserap 98,35% dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp. 200.800.000 atau 100 % dari target. Uraian Realisasi Program sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran per program

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.543.918.878,-	5.433.554.959,-	98,00	110.363.919,-
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	1.263.291.000,-	1.263.170.200,-	99,99	120.800,-
3.	Aplikasi Informatika	647.855.400,-	633.737.633,-	97,82	14.117.767,-
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	209.843.000,-	197.703.494,-	94,22	12.139.506,-
5.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	624.420.600,-	624.258.199,-	99,9	162.401,-

2. Penyerapan Anggaran per jenis Belanja

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Terhadap Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Belanja Pegawai	2.529.319.000,-	2.460.791.695,-	97,29	68.527.305,-
2.	Belanja Barang	3.513.946.878,-	3.452.023.178,-	98,24	61.923.700,-
3.	Belanja Modal	2.246.063.000,-	2.239.609.612,-	99,71	1.981.500,-

Dari table tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa anggaran yang tersedia (DPA) untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tahun 2022 ini sebesar Rp. 8.289.328.878,- (Delapan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dan Realisasi sampai dengan Desember sebesar Rp. 8.152.424.485,- (Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua

Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan jika dipersentasekan mencapai 98,35%. Capaian terbesar Program dan kegiatan sudah terealisasi dapat dilihat pada semua Program Kegiatan yaitu, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Informasi dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatika, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, meskipun ada hambatan dalam pencapaian target kinerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 Tahun ke depan adalah :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Adapun rumusan pemaknaan visi tersebut adalah :

Bandar Maritim : seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar muat barang serta perdagangan barang, jasa dan industri.

Kawasan Timur Indonesia : Berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistic yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah bagian Timur, Maluku dan Maluku Utara.

Mengacu pada Visi tersebut maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Periode 5 (Lima) Tahun RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel Dan Transparan
- Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan
- Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
- Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kelautan
- Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan
- Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yaitu :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pada Misi 1 ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih professional, bermutu dan akuntabel menuju tata Kelola yang baik melalui penyelenggaraan e-Government. Selain telaahn terhadap visi dan misi yang diuraikan di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program-program kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pada misi ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diharapkan mampu meningkatkan layanan telekomunikasi desa dalam upaya meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri menghadapi era digitalisasi.

Dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar dalam Portal Satu data Selayar.
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online.
5. Pengembangan jaringan telekomunikasi data yang aman.
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat, yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab.
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Penjabaran dari rancangan awal rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel V berikut :

TABEL TC-31.
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (RP)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja	70,28 %	3.476.065.982	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja	70,53 %	3.559.456.805	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %	33.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100 %	33.500.000	Besaran anggaran telah diperhitungkan sesuai kebutuhan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	4.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	1 Dok	5.000.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dtk	4.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dtk	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	100 %	2.686.929.314	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	100 %	2.770.320.137	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepulauan Selayar	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	2.666.929.314	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kepulauan Selayar	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	2.750.320.137	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dtk	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dtk	0	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Laporan	5.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dtk	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dtk	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dtk	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dtk	5.000.000	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dtk	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dtk	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	5.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Capaian Kinerja	100 %	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Capaian Kinerja	100 %	0	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Capaian Kinerja	100 %	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Capaian Kinerja	100 %	0	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35 Paket	0	

	Perindahan Tugas ASN	Kepulauan Selayar	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	1 Orang	0	Perindahan Tugas ASN	Kepulauan Selayar	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	1 Orang	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kepulauan Selayar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kepulauan Selayar	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	0	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepulauan Selayar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepulauan Selayar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50 Orang	0	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepulauan Selayar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kepulauan Selayar	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Capaian Kinerja	100 %	247.826.668	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Capaian Kinerja	100 %	247.826.668	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	25 Dbk	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	25 Dbk	15.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	200.326.668	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	200.326.668	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket	0	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepulauan Selayar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Paket	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepulauan Selayar	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Paket	0	

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepulauan Selayar	Jumlah Uhit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Uhit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepulauan Selayar	Jumlah Uhit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Uhit	0	
	Pengadaan Mebel	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	Pengadaan Mebel	Kepulauan Selayar	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Capaian Kinerja	100 %	375.240.000	Penyediaan Jasa Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Capaian Kinerja	100 %	375.240.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.240.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.240.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	300.000.000	
	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Barang Mlik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	132.570.000	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Usuhan Pemerintahan Daerah	Kepulauan Selayar	Persentase Barang Mlik Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	132.570.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepulauan Selayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Uhit	45.270.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kepulauan Selayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Uhit	45.270.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepulauan Selayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Uhit	49.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kepulauan Selayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Uhit	49.300.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kepulauan Selayar	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 Uhit	0	Pemeliharaan Mebel	Kepulauan Selayar	Jumlah Mebel yang dipelihara	1 Uhit	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepulauan Selayar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Uhit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kepulauan Selayar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Uhit	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepulauan Selayar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Uhit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kepulauan Selayar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Uhit	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepulauan Selayar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	1 Uhit	38.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepulauan Selayar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	1 Uhit	38.000.000	

	Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepulauan Selayar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	0	Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kepulauan Selayar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	0	
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kepulauan Selayar	Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas	100 %	1.039.257.745	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kepulauan Selayar	Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas	100 %	1.064.189.538	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola	100	1.039.257.745	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola	100	1.064.189.538	
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik	1 Dsk	35.000.000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik	1 Dsk	35.000.000	
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dsk	0	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dsk	0	
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dsk	50.000.000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dsk	50.000.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dsk	404.257.745	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dsk	404.257.745	
	Pelayanan Informasi Publik	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dsk	225.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dsk	225.000.000	
	Layanan Hubungan Media	Kepulauan Selayar	Jumlah Layanan Hubungan Media	7 Layanan	45.000.000	Layanan Hubungan Media	Kepulauan Selayar	Jumlah Layanan Hubungan Media	7 Layanan	45.000.000	
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dsk	150.000.000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dsk	150.000.000	
	Manajemen Komunikasi Krisis	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dsk	0	Manajemen Komunikasi Krisis	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dsk	0	
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kepulauan Selayar	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang	0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kepulauan Selayar	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	3 Orang	0	
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dsk	0	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dsk	0	

	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kermitraan Komunitas	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Kermitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dok	130.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kermitraan Komunitas	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Kermitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dok	130.000.000	
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	10 Unit	0	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten	10 Unit	0	
3.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kepulauan Selayar	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi	100 %	3.484.136.731	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kepulauan Selayar	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi	100 %	3.567.721.172	
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah	100 %	1.050.000.000	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah	100 %	1.050.000.000	
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	0	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Domain	0	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	1 Unit	50.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	1 Unit	50.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Dok	1.000.000.000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Dok	1.000.000.000	
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola	100 %	2.434.136.731	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola	100 %	2.517.721.172	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	150.000.000	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dok	150.000.000	

	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dok	75.000.000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dok	75.000.000	
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1.000.000.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	1.000.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dok	225.000.000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dok	225.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dok	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dok	0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kepulauan Selayar	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	34 Perangkat Daerah	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kepulauan Selayar	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	34 Perangkat Daerah	50.000.000	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kepulauan Selayar	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	1 Unit	300.000.000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kepulauan Selayar	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	1 Unit	300.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kepulauan Selayar	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	0	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kepulauan Selayar	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	0	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	1 Dok	334.136.731	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	1 Dok	334.136.731	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	200.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dok	283.584.441	
	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCI)</i>	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCI)</i>	1 Dok	0	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCI)</i>	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer (GCI)</i>	1 Dok	0	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dok	100.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dok	100.000.000	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kepulauan Selayar	Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	100 %	356.739.384	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kepulauan Selayar	Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	100 %	365.297.652
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	356.739.384	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	365.297.562
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dok	76.739.384	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kepulauan Selayar	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dok	85.297.562
	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kepulauan Selayar	Jumlah SDM Pemerintah yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	64 Orang	50.000.000	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kepulauan Selayar	Jumlah SDM Pemerintah yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	64 Orang	50.000.000
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kepulauan Selayar	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dok	45.000.000	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kepulauan Selayar	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dok	45.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kepulauan Selayar	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari EPS	14 OPD	45.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kepulauan Selayar	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari EPS	14 OPD	45.000.000
	Pengembangan Infrastruktur	Kepulauan Selayar	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	105.000.000	Pengembangan Infrastruktur	Kepulauan Selayar	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	105.000.000
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dok	35.000.000	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Kepulauan Selayar	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dok	35.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kepulauan Selayar	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	357.535.490	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kepulauan Selayar	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	100 %	366.117.766
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	100 %	297.535.490	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	100 %	306.117.766
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dok	37.535.490	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dok	37.535.490

	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	150.000.000	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	60.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kepulauan Selayar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 laporan	60.000.000	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	50.000.000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	50.000.000	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	100 %	60.000.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	100 %	60.000.000	
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	60.000.000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	60.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan diperoleh melalui penelitian dan pengamatan lapangan, kunjungan kerja Kepala Daerah, pelaksanaan musrenbang kecamatan/kabupaten serta melalui proses pembahasan Komisi DPRD sebagai wakil rakyat.

Untuk lebih jelasnya, Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel T-C.32 sesuai Format terlampir pada Juknis.

TABEL TC-.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Cat.
I	Program Aplikasi Informatika				
A	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dusun Tulang, Dusun Polebunging, Dusun Baturapa, Dusun Karajaang, Dusun Bontotinggi, Dusun Bontosaille, Dusun Buki-Buki Utara, Dusun Buki-Buki Selatan, Dusun Lembang Bau, Dusun Dongang-Dongang, Dusun Tombangangia, Pattumbukang, Desa Polassi,	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	13 Buah	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOSP

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat.

Perencanaan yang ideal harus mempunyai prinsip partisipatif karena masyarakat yang akan memperoleh manfaatnya maka masyarakat juga harus turut serta dalam prosesnya melalui penyelenggaraan musrenbang RPJMD. Sehingga fungsi perencanaan sebagai alat koordinasi seluruh pemangku kepentingan dapat tercapai.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut meliputi rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan yang seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran dalam tahun 2024.

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gambaran tentang realitas masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Visi tersebut disusun dengan memperhatikan visi misi Bupati/Wakil Bupati dan arah pembangunan daerah jangka menengah serta isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bertolak dari visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian,
2. Digitalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke kabupaten,
3. meningkatkan layanan telekomunikasi dan informatika daerah, meningkatkan layanan data statistic sectoral,
4. meningkatkan layanan persandian,
5. meningkatkan layanan telekomunikasi di Desa.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta pencapaian sasaran SKPD, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, mempunyai 5 (Lima) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 54 (Lima Puluh Empat) sub kegiatan.

Untuk lebih jelasnya, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Tabel 3.3. sebagai Lampiran (sesuai Format terlampir pada Juknis).

Tabel TC-.3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
216	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan non dasar										
216	01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		70,53	8.713.735.332	DAU		71,51	8.922.777.843		
216	01	2.01	PROGRAM PENUNJANG URLSAN PEMBERINTAHAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja		100	3.476.065.982	DAU	100	3.559.456.805	
216	01	2.01	001	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi Kinerja yang tersusun	Kepulauan Selayar	100	33.500.000	DAU	100	33.500.000
216	01	2.01	002	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	2 Dok	7.500.000	DAU	3 Dok	7.500.000
216	01	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepulauan Selayar	1 Dok	4.000.000	DAU	1 Dok	4.000.000

216	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kepulauan Selayar	1 Dok	4.000.000	DAU		1 Dok	4.000.000
216	01	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	1 Dok	4.000.000	DAU		1 Dok	4.000.000
216	01	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kepulauan Selayar	1 Dok	5.000.000	DAU		1 Dok	5.000.000
216	01	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepulauan Selayar	3 Dok	5.000.000	DAU		3 Dok	5.000.000
216	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun	Kepulauan Selayar	100%	2.686.929.314	DAU		100	2.770.320.137
216	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kepulauan Selayar	39 Orang	2.666.929.314	DAU		39 Orang	2.750.320.137
216	01	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kepulauan Selayar	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.000.000
216	01	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kepulauan Selayar	12 Laporan	5.000.000	DAU		12 Laporan	5.000.000

216	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keput, auan Selayar	12 Laporan	5.000.000	DAU		12 Laporan	5.000.000
216	01	2.02	008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keput, auan Selayar	12 Dbk	5.000.000	DAU		12 Dbk	5.000.000
216	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja	Keput, auan Selayar	100	0	DAU		100	0
216	01	2.05	001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keput, auan Selayar	1 paket	0	DAU		1 Paket	0
216	01	2.05	003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Keput, auan Selayar	2 ASN	0	DAU		2 ASN	0
216	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Keput, auan Selayar	100	247.826.668	DAU		100	247.826.668
216	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	Keput, auan Selayar	1 paket	0	DAU		1 paket	0

216	01	2.06	004	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Keput;auan Selayar	1 paket	25.000.000	DAU		1 paket	25.000.000
216	01	2.06	005	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Keput;auan Selayar	25 Dk	15.000.000	DAU		25 Dk	15.000.000
216	01	2.06	006	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keput;auan Selayar	1 Laporan	7.500.000	DAU		1 Laporan	7.500.000
216	01	2.06	007	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keput;auan Selayar	120 Laporan	200.326.668	DAU		120 Laporan	200.326.668
216	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja	Keput;auan Selayar	100%	375.240.000	DAU		100%	375.240.000
216	01	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keput;auan Selayar	1 Laporan	5240.000	DAU		1 Laporan	5240.000
216	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	Keput;auan Selayar	1 Laporan	70.000.000	DAU		1 Laporan	70.000.000
216	01	2.08	003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Keput;auan Selayar	1 Laporan	300.000.000	DAU		1 Laporan	300.000.000
216	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Keput;auan Selayar	100%	132.570.000	DAU		100%	132.570.000
216	01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Keput;auan Selayar	1 Unit	135.810.000	DAU		1 Unit	135.810.000
216	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan pajak dan perizinannya	Keput;auan Selayar	10 Unit	45.270.000	DAU		10 Unit	45.270.000

216	01	2.09	006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	Kepulauan Selayar	1 Unit	38.000.000	DAU		1 Unit	38.000.000
216	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Sistem Informasi terkait Program dan Kebijakan Pemerintah yang berkualitas	Kepulauan Selayar	100	1.039.257.745	DAU		100	1.064.189.538
216	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Komunikasi Publik yang Dikelola	Kepulauan Selayar	100	1.039.257.745	DAU		100	1.064.189.538
216	02	2.01	001	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan aspirasi Publik	Kepulauan Selayar	1 Dok	35.000.000	DAU		1 Dok	35.000.000
216	02	2.01	003	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kepulauan Selayar	1 Dok	50.000.000	DAU		1 Dok	50.000.000
216	02	2.01	004	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kepulauan Selayar	1 Dok	404.257.745	DAU		1 Dok	404.257.745
216	02	2.01	005	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kepulauan Selayar	1 Dok	225.000.000	DAU		1 Dok	225.000.000
216	02	2.01	006	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kepulauan Selayar	7 Layanan	45.000.000	DAU		7 Layanan	45.000.000
216	02	2.01	007	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kepulauan Selayar	1 Dok	150.000.000	DAU		1 Dok	150.000.000
216	02	2.01	011	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kepulauan Selayar	1 Dok	130.000.000	DAU		1 Dok	130.000.000
216	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Terintegrasi	Kepulauan Selayar	100	3.484.136.731	DAU		100	3.567.721.172
216	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain yang Dikelola Pemerintah	Kepulauan Selayar	100	1.050.000.000	DAU		100	1.050.000.000

216	03	2.01	002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Kepulauan Selayar	1 Dok	50.000.000	DAU		1 Dok	50000.000
216	03	2.01	003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	1 Unit	1.000.000.000	DAU		1 Unit	1.000.000.000
216	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Terkelola	Kepulauan Selayar	100	2.434.136.731	DAU		100	2.517.721.172
216	03	2.02	001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	1 Dok	150.000.000	DAU		1 Dok	150.000.000
216	03	2.02	002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kepulauan Selayar	1 Dok	75.000.000	DAU		1 Dok	75.000.000
216	03	2.02	003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Kepulauan Selayar	1 web	1.000.000.000	DAU		1 web	1.000.000.000
216	03	2.02	004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	1 Dok	225.000.000	DAU		1 Dok	225.000.000
216	03	2.02	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Kepulauan Selayar	10 OPD	50.000.000	DAU		10 OPD	50.000.000
216	03	2.02	006	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	Kepulauan Selayar	1 Unit	300.000.000	DAU		1 Unit	300.000.000
216	03	2.02	007	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Kepulauan Selayar	1 Dok	334.136.731	DAU		1 Dok	334.136.731

216	2.02	010	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kepulauan Selayar	1 Dok	200.000.000	DAU		1 Dok	283.584.441
216	03	2.02	011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Kepulauan Selayar	1 Dok	0	DAU		1 Dok	0
216	03	2.02	012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPEE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPEE	Kepulauan Selayar	1 Dok	100.000.000	DAU		1 Dok	100.000.000
216				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Kepulauan Selayar	100	330.000.000	DAU		100	365.297.562
216	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kepulauan Selayar	100	356.739.384	DAU		100	365.297.562
216	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepulauan Selayar	100	356739384	DAU		100	365.297.562
216	02	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kepulauan Selayar	1 Dok	76.739.384	DAU		1 Dok	140.000.000
216	02	2.01	002	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Pemerintah yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kepulauan Selayar	64 orang	50.000.000	DAU		36 orang	60.000.000
	02	2.01	003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kepulauan Selayar	1 Dok	45.000.000	DAU		1 Dok	35.000.000
216	02	2.01	004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Kepulauan Selayar	14 OPD	45.000.000	DAU		14 OPD	40.297.562
216	02	2.01	005	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Kepulauan Selayar	1 Unit	105.000.000	DAU		1 Unit	50.000.000
216	02	2.01	006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kepulauan Selayar	1 Dok	35.000.000	DAU		1 Dok	40.000.000
216				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Persentase Keamanan Informasi Pemerintah	Kepulauan Selayar	100	357.535.490	DAU		100	366.112.766

216	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	Kepulauan Selayar	100	297.535.490	DAU		100	321.112.766
216	02	2.01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kepulauan Selayar	1 Dok	35.535.490	DAU		1 Dok	45.000.000
216	02	2.01	001	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kepulauan Selayar	1 Laporan	150.000.000	DAU		1 Laporan	58.000.000
216	02	2.01	002	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kepulauan Selayar	1 Laporan	60.000.000	DAU		1 Laporan	158.112.766
216	02	2.01	003	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kepulauan Selayar	1 OPD	50.000.000	DAU		1 OPD	60.000.000
216	02	2.01	004	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah dengan Persandian	Kepulauan Selayar	100	60.000.000	DAU		100	45.000.000
216	02	2.02		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Kepulauan Selayar	1 OPD	60.000.000	DAU		1 OPD	45.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOSP

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program DISKOMINFOSP Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD. Sedangkan kegiatan merupakan aktivitas-aktivitas yang terukur bersifat tahunan dari program-program yang telah ditetapkan.

Program dimaksud hanya program lokalitas kewenangan DISKOMINFOSP Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penataan kepegawaian dan pelayanan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISKOMINFOSP Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada setiap urusan pemerintahan, meningkatkan penyebarluasan informasi public yang berkualifikasi.
3. Program Aplikasi Informatika
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dan informatika daerah dan meningkatkan sarana telekomunikasi.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program ini dimaksudkan dalam rangka tersedianya data yang akuntabel dan dapat berbagai pakai, sehingga dapat dimanfaatkan dalam Menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Program ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan Layanan keamanan informasi Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, maka pendanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 membutuhkan dana/pagu indikatif sebanyak Rp.8.713.735.332,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum.

BAB V

PENUTUP

Untuk meningkatkan capaian kinerja dimasa mendatang telah menetapkan beberapa kebijakan strategis yang perlu mendapat perhatian, antara lain dengan :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah;
3. Pengembangan implementasi e-government Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online;
5. Pengembangan Jaringan komunikasi data yang aman;
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
7. Ketersediaan layanan informasi public yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
8. Pengembangan sumberdaya aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Daerah yang menguasai teknologi informasi.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024. Semoga Renja ini dapat berfungsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2024.

Benteng, 14 Maret 2023

KEPALA DINAS,

Drs. AHMAD YANI.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670312 199203 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOSP TAHUN 2022.....	8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFOSP TAHUN 2022.....	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DISKOMINFOSP.....	27
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DISKOMINFOSP.....	35
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	37
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	47
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFOSP.....	48
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	48
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISKOMINFOSP.....	48
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	49
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISKOMINFOSP.....	58
BAB V : PENUTUP.....	60

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar. Ruang Lingkup pembahasan memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kemudian dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan dapat menjadi acuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Renja ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Amin !

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 14 Maret 2023

KEPALA DINAS,

Drs. AHMAD YANI.

Pangkat : Pembina Utama muda

NIP. 19670312 19920312 1 004

